

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber pendapatan terbesar bagi negara adalah pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mengembangkan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta mendukung keamanan dan ketahanan. Peran perpajakan bagi negara begitu besar sehingga pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan departemen pajak.<sup>1</sup>

Sisi akuntansi menjelaskan bahwa pajak adalah beban yang mengurangi laba bersih. Ini bertentangan dengan tujuan badan usaha yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Faktor inilah yang menjadikan perpajakan sebagai beban dan kewajiban yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).<sup>2</sup>

Berita online [finance.detik.com](http://finance.detik.com) yang diterbitkan pada tanggal 05 Juli 2019 oleh Danang Sugianto pukul 16.32 WIB hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu perusahaan tambang di Indonesia PT Adaro Energy Tbk yang tercatat di Jakarta Islamic Index (*JII*) melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Dikatakan bahwa pajak yang diatur oleh PT Adaro adalah US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah dari pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia. Menurut Yustinus jika memang demikian rencana PT Adaro membuat anak perusahaan perdagangan batu bara di Singapura Coltrade, maka kategorinya masuk dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*)

---

<sup>1</sup> Farid Addy Sumantri, Rr. Dian Anggraeni, dan Agus Kusnawan, "Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *ECo-Buss* 1, no. 2 (2018): 137, <https://doi.org/10.32877/eb.v1i2.47>.

<sup>2</sup> Sri Mulyani, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 3, no. 1 (May 14, 2018): 330, <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>.

secara legal karena memenuhi persyaratan. PT Adaro memanfaatkan celah ini dengan menjual batu bara ke Singapura, Coaltrade Services International dengan harga lebih murah. Kemudian menjual batu bara ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga membuat penghasilan kena pajak Indonesia lebih murah. Artinya, penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya.<sup>3</sup>

Kasus lain menunjukkan kasus penghindaran pajak antara PT Pelita, Molucca dan PT Permata. Menurut Hotman jika dugaan Permata mendirikan Molucca, Permata memiliki dua keuntungan dalam penghindaran pajak. Pertama sesuai dengan pasal 17 ayat (2) huruf a UU PPh, pajak 25% PPh dikecualikan karena piutang dari Pelita telah dialihkan ke Molucca dan diperhitungkan sebagai kerugian (*write off*). Kedua, jika pada akhirnya Pelita memenuhi kewajibannya akan tetapi Molucca sudah memegang piutang tersebut. Hotman mengatakan, sebagai perusahaan asing, Molucca juga tidak diwajibkan membayar pajak kepada Indonesia atas pembayaran tersebut.<sup>4</sup>

Alasan dilakukannya praktik penghindaran pajak karena memberikan manfaat yang berharga bagi pengguna internal dan eksternal perusahaan. Pertama, memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak. Kedua, konsekuensi potensial dari penghindaran pajak dicerminkan dalam simpanan kas yang dapat menghasilkan arus kas bagi pemegang saham, yang dapat mengarah pada serangkaian investasi dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Ketiga, manajer bisa mendapatkan keuntungan dari penghindaran pajak karena mereka diberi penghargaan melalui bonus berkaitan dengan pengelola pajak perusahaan. Terakhir, kegiatan penghindaran

---

<sup>3</sup> Danang Sugianto, "Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan Ke Adaro," *Berita Ekonomi Bisnis*, 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>.

<sup>4</sup> Anggar Septiadi, "Pelita Cengkareng Gugat Balik Molucca dan Bank Permata Soal Penghindaran Pajak," *Berita Nasional*, 2018, <https://amp.kontan.co.id/news/pelita-cengkareng-gugat-balik-molucca-dan-bank-permata-soal-penghindaran-pajak>.

pajak dapat digunakan untuk mendanai proyek perusahaan tanpa harus meminjam dana lain.<sup>5</sup>

*Agency theory* (teori keagenan) merupakan sudut pandang yang dapat menggambarkan masalah dengan jelas yang timbul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, yaitu terdapat benturan kepentingan dalam perusahaan.<sup>6</sup> Manajer perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang benar dari pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang benar.<sup>7</sup> Oleh karena itu perlu untuk meminimalkan risiko konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer dengan menggunakan pihak ketiga yang membantu mengawasi keputusan manajer.<sup>8</sup> Mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah keagenan yaitu mekanisme *islamic corporate governance*.<sup>9</sup>

*Islamic Corporate Governance* berusaha untuk merancang cara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral

---

<sup>5</sup> Amneh Alkurdi and Ghassan H. Mardini, "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan," *Journal of Financial Reporting and Accounting* 18, no. 4 (2020): 802, <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>.

<sup>6</sup> Siti Asiyah, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)," *Petra Business & Management Review* 4, no. 2 (2018): 115, <https://doi.org/10.32877/eb.v1i2.47>.

<sup>7</sup> Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di BEI)," 2018.

<sup>8</sup> Alkurdi and Mardini, "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan," 2020.

<sup>9</sup> Amirul Arif dan Agus Purwanto, "Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia," Permana: *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 12, no. 2 (2020): 184, <https://doi.org/10.24905/permana.v12i2.107>.

dan sosial berdasarkan hukum syariah.<sup>10</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *islamic corporate governance* merupakan turunan konsep dari *good corporate governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG,<sup>11</sup> yaitu adanya *corporate governance* yang baik dan benar diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan menjauhkan perusahaan dari perusahaan yang tidak dikelola dengan baik yang menimbulkan kesulitan bagi perusahaan.<sup>12</sup> Dalam *islamic corporate governance* perusahaan harus mengikuti 5 prinsip yang mana telah mencakup prinsip-prinsip *corporate governance* konvensional yaitu transparansi (*transparency*) merujuk pada shiddiq, akuntabilitas (*accountability*) merujuk pada amanah, pertanggungjawaban (*responsibility*) merujuk pada tablig, kemandirian (*independency*) merujuk pada fathanah, kewajaran (*fairness*) merujuk pada adil.<sup>13</sup> Kelima prinsip ini diperlukan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya.<sup>14</sup>

Prinsip *islamic corporate governance* memiliki peluang untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi.<sup>15</sup> Prinsip-prinsip *islamic corporate governance* diprediksi mampu mengendalikan *tax avoidance*, pertama prinsip shiddiq (jujur) karena berpartisipasi aktif

---

<sup>10</sup> Nova Rini, "Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia," *The International Journal of Applied Business Tijab* 2, no. 1 (2018): 31–32.

<sup>11</sup> Rini, "Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia" 2018.

<sup>12</sup> Sumantri, Anggraeni, dan Kusnawan, "Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," 2018.

<sup>13</sup> Ahmad Sodiq, "Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung," *The International Journal Of Applied Business Tijab* 1, no. 2 (2017): 34.

<sup>14</sup> Thodo Dixon Karel Manurang, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Kargo di Surabaya," *AGORA* 6, no. 2 (2018).

<sup>15</sup> Rini, "Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia", 2018.

dalam pengambilan keputusan perusahaan dan berharap dapat menyesuaikan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham eksternal dan manajemen secara jujur. Proksi yang digunakan adalah kepemilikan manajerial.<sup>16</sup> Kedua prinsip amanah (dapat dipercaya) karena menjelaskan fungsi masing-masing organisasi dan mengevaluasi penetapan kebijakan berdasarkan perubahan bisnis yang berkelanjutan untuk menjaga operasional bisnis. Proksi yang digunakan adalah dewan komisaris.<sup>17</sup>

Ketiga prinsip tablig (menyampaikan) karena hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemangku kepentingan (seperti karyawan perusahaan) agar dapat bekerja dengan baik. Proksi yang digunakan adalah jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja).<sup>18</sup> Keempat prinsip fathanah (cerdas) karena tidak ada pengaruh dari para pemegang saham lain, sebab pemegang saham mempercayai auditor internal untuk melakukan audit internal yang bertujuan untuk mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Proksi yang digunakan adalah audit internal.<sup>19</sup> Terakhir prinsip adil karena pengelolaan yang adil kepada semua pihak yang ada sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga melindungi manajemen perusahaan dari tuntutan

---

<sup>16</sup> Yusup Hari Subagya, "Keterkaitan Kepemilikan Manajerial, Institusional, dan Komite Audit pada Nilai Perusahaan di Mediasi oleh Kualitas Laba," *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis* 5, no. 2 (2017): 119, <https://doi.org/10.26486/jpsb.v5i2.353>.

<sup>17</sup> Manurang, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Kargo di Surabaya", 2018.

<sup>18</sup> Lukas William Andypratama dan Ronny H Mustamu, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga: Studi Deskriptif pada Distributor Makanan," *AGORA* 1, no. 1 (2013).

<sup>19</sup> Alexander H Kusumo dan Maria Praptiningsih, "Implementasi Prinsip Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness pada Perusahaan Keluarga PT Genesys Integrated Indonesia di Surabaya," *AGORA* 2, no. 1 (2014), <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/1420>.

pihak tertentu yang dirugikan. Proksi yang digunakan adalah komite audit.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini diketahui terdapat penelitian terdahulu yang telah meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, pengukuran *corporate governance* yang digunakan sebagai proksi pada penelitian terdahulu adalah dewan komisaris dan komite audit.<sup>21</sup> Kedua, pengukuran *corporate governance* yang digunakan sebagai proksi pada penelitian terdahulu adalah dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional.<sup>22</sup> Ketiga, pengukuran *tax avoidance* yang digunakan sebagai proksi pada penelitian terdahulu adalah CETR.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini untuk mengetahui terjadinya *islamic corporate governance* dan *tax avoidance* pada perusahaan peneliti menggunakan proksi yang berbeda dari penelitian terdahulu. Proksi yang digunakan sebagai variabel dependen yaitu ETR (*Effective Tax Rate*)<sup>24</sup> dan CFETR (*Cash Flow Effective Tax Rate*).<sup>25</sup> Sedangkan proksi yang digunakan sebagai variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris, jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), audit internal, dan komite audit.

---

<sup>20</sup> Bernadinus. Chrisdianto, "Peran Komite Audit dalam Good Corporate Governance," *Jurnal Akuntansi Aktual* 2, no. 1 (2013): 2.

<sup>21</sup> Muhammad Jalil, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2 (2019): 89.

<sup>22</sup> Eka Ria Fauziyah, Noviansyah Rizal, dan Moch. Hudi Setyobakti, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017," *PROGRESS Conference* 2, no. (2019): 40, <http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress>.

<sup>23</sup> Sumantri, Anggraeni, dan Kusnawan, "Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," 2018.

<sup>24</sup> Asthari Oliviana dan Dul Muid, "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance," *Diponegoro Journal Of Accounting* 8, no. 3 (2019): 1.

<sup>25</sup> Alkurdi and Mardini, "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan," 2020.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa hanya kepemilikan institusional yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.<sup>26</sup> Penelitian terdahulu lainnya menyimpulkan kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.<sup>27</sup>

Alasan peneliti tertarik mengangkat topik tentang pengaruh *islamic corporate governance* terhadap *tax avoidance* yaitu, pertama dari beberapa penelitian terdahulu jika dilihat dari variabel independen dan variabel dependen yang sama menunjukkan hasil atau pengaruh yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti tertarik mengangkat kembali topik tentang pengaruh *islamic corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Kedua, berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi pada perusahaan JII,<sup>28</sup> laba atau keuntungan tinggi sehingga perpajakan sebagai beban dan kewajiban menjadi tinggi pula yang memicu terjadinya *tax avoidance* dengan bantuan mekanisme *islamic corporate governance*. Perlunya mekanisme *islamic corporate governance* dikarenakan *agent* terkadang menyembunyikan informasi yang benar dari pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi

---

<sup>26</sup> Fauziyah, Rizal, dan Setyobakti, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017," 2019.

<sup>27</sup> Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)," 2018.

<sup>28</sup> TIM BEI, "Indeks-Indeks Saham Syariah," Berita Oke Finance, 2018, <https://economy.okezone.com/read/2018/06/22/278/1912629/indeks-indeks-saham-syariah>.

yang benar.<sup>29</sup> Sehingga *islamic corporate governance* perlu untuk meminimalkan risiko konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer.<sup>30</sup>

Untuk mengukur *tax avoidance* pada perusahaan, peneliti menggunakan proksi ETR dan CFETR sebagai pembaruan dari penelitian terdahulu yang menggunakan proksi CETR. Dan untuk menganalisis pengaruh *islamic corporate governance* peneliti menggunakan proksi kepemilikan manajerial, jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), serta audit internal sebagai pembeda dan tambahan dari penelitian terdahulu yang menggunakan proksi dewan komisaris dan komite audit. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, pengambilan sampel dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai pembeda dari penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini penulis mengambil objek saham syariah pada perusahaan yang berbasis syariah dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) sebagai konstituen JII yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid tercatat di BEI berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi.<sup>31</sup>

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)?

---

<sup>29</sup> Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)," 2018.

<sup>30</sup> Alkurdi and Mardini, "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan," 2020.

<sup>31</sup> Nawang Kalbuana, Rinosa Ari Widagdo, dan Devia Rahma Yanti, "Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index," *Jurnal Riset Akuntansi Politala* 3, no. 2 (2020): 48, <https://doi.org/10.34128/jra.v3i2.56>.

2. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)?
3. Bagaimana pengaruh jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)?
4. Bagaimana pengaruh audit internal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)?
5. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah diatas:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh audit internal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).
5. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini dapat mendorong pengembangan pengetahuan tentang pengaruh kepemilikan manajerial, dewan komisaris, jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja),

audit internal, serta komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh kepemilikan manajerial, dewan komisaris, jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), audit internal, serta komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.

### b. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan secara efektif dapat melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan variabel jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) karena pemberian kompensasi kepada manajer berperan dalam memotivasi kinerja manajer dalam memberikan upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Dan variabel komite audit karena dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih memahami celah dalam peraturan perpajakan dengan penemuan yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang bermanfaat untuk penghindaran pajak.

### c. Bagi institusi

Untuk menambah referensi perpustakaan IAIN KUDUS khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab, setiap bab berisi petunjuk untuk menjelaskan masalah yang terkait dengan penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini meliputi pembahasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, dan analisis data (pembuktian hipotesis) tentang pengaruh kepemilikan manajerial, dewan komisaris, jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), audit internal, serta komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan saran terkait penelitian penulis tentang pengaruh kepemilikan manajerial, dewan komisaris, jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), audit internal, serta komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.

